

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI PRESIDEN WANITA DI INDONESIA (2001-2004)

Andi Lis Pratiwi¹

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Email; lispratiwi@gmail.com

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia Megawati Soekarnoputri adalah satu-satunya wanita pertama yang menjabat sebagai presiden RI, tampilnya Megawati Soekarnoputri sebagai presiden RI 2001-2004, dimana sistem pemerintahan yang digunakan adalah Kabinet Gotong Royong. Namun, kinerja Megawati Soekarnoputri dalam memimpin pemerintahan (2001-2004) memang tidak bisa membuktikan kepada publik bahwa Megawati Soekarnoputri Memiliki kesamaan kapasitas dengan gaya kepemimpinan ayahnya Bung Karno. Dalam masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri banyak kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia salah satunya terjualnya aset negara untuk membayar utang negara.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Megawati Soekarnoputri dapat memperbaiki keadaan Indonesia melalui kebijakan bidang ekonomi dan kebijakan bidang hukum. Capaian selama pemerintahan Megawati Soekarnoputri yaitu politik dan hukum, ekonomi, pertahanan dan keamanan, pemberantasan korupsi dan pemberantasan terorisme.

Kata Kunci: Megawati Soekarnoputri, Presiden Wanita Indonesia

A. PENDAHULUAN

Megawati Soekarnoputri merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan anak dari presiden Indonesia pertama, Soekarno yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi presiden. Megawati Soekarnoputri menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001, sidang istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan partai Golkar. Megawati Soekarnoputri dilantik pada 23 Juli 2001 sebelumnya dari tahun 1999-2001 Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai wakil presiden pada pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999.²

Karir Politik Megawati Soekarnoputri yang penuh liku dan warna seakan searah dengan garis kehidupan perjalanan bahtera rumah tangganya yang pernah mengalami kegagalan. Masuknya Megawati Soekarnoputri ke kancah politik berarti Megawati Soekarnoputri telah ingkar kepada keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik. Tetapi, Megawati Soekarnoputri terus berjuang untuk membuktikan kepada bangsa dan Negara bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin di Indonesia. Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai presiden wanita pertama di Indonesia (2001-2004) pastinya memotivasi masyarakat khususnya perempuan guna mewarisi semangat juang Megawati Soekarnoputri.

Kinerja Megawati Soekarnoputri dalam memimpin pemerintahan (2001-2004) memang tidak dapat membuktikan kepada publik bahwa Megawati Soekarnoputri memiliki kesamaan kapasitas dengan gaya kepemimpinan ayahnya Bung Karno. Dalam pemerintahan Megawati banyak kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia salah satunya terjualnya aset Negara untuk membayar utang Negara. Dalam

¹ Alumni Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

²<http://System.Pemerintahan.Megawati.Soekarnoputri.2001-2004.Htm>

bidang ekonomi Megawati Soekarnoputri mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi pemulihan ekonomi dan penegakan hukum.

Megawati Soekarnoputri dalam masa pemerintahannya dimana sistem pemerintahannya disebut kabinet gotong royong, Megawati Soekarnoputri berusaha memperbaiki keadaan Indonesia, sekaligus memperbaiki situasi ketidakpastian megawati Soekarnoputri memperlihatkan kepada publik langkah apa yang pasti untuk memulihkan iklim investasi menjadi kondusif, menaikkan produktifitas dan efisiensi serta membangun stabilitas politik dan keamanna Nasional.³

B. PEMBAHASAN

A. Kebijakan Megawati Soekarno Putri Pada Saat Menjadi Presiden.

1. Bidang Ekonomi

Pemerintahan Megawati Soekarnoputri mewarisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk dari pada pemerintahan Gus Dur. Inflasi yang dihadapi kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati Soekarnoputri juga sangat berat. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri disebabkan antara lain masih kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri maupun swasta. Melihat indikator lainnya, yakni nilai tukar rupiah.⁴

Sejauh ini momentum menuju perbaikan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, seiring dengan itu sejumlah masalah-masalah ekonomi maupun nonekonomi terus membayangi upaya pemulihan ekonomi sejumlah agenda permasalahan yang mesti diselesaikan sebagai prasyarat pemulihan ekonomi antara lain ialah penguatan landasan sektor perbankan agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Agenda permasalahan lain adalah menyangkut kinerja BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dalam melakukan Restruktisasi perusahaan penjualan aset-aset yang dikelolanya.⁵

Di bidang ekonomi, Megawati Soekarnoputri sudah berusaha membuat perangkap ketergantungan publik terhadap pemerintahannya lewat kebijakan yang belum tuntas dilaksanakan hingga akhir masa jabatan kepresidenannya. Megawati Soekarnoputri mengeluarkan kebijakan yang populer disebut "*White paper*" pada medio 2003, dengan mengakhiri hubungan kerja sama pemulihan krisis ekonomi dengan dana moneter internasional (IMF).⁶

Dengan waktu yang tersisih semestinya Kabinet Gotong Royong Di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri bisa menunjukkan kinerja dimana Megawati Soekarnoputri mampu memperbaiki keadaan indonesia dari krisis ekonomi. Sekaligus memperbaiki situasi ketidakpastian dan faktor resiko yang masih tinggi. Megawati Soekarnoputri harus memperlihatkan kepada publik langkah yang pasti untuk memulihkan investasi menjadi kondusif, menaikkan produktifitas dan efisiensi, serta membangun stabilitas politik dan keamanan nasional.

Untuk menjalankan Roda Pemerintahan masa lalu, kemampuan keuangan negara di masa Megawati Soekarnoputri memang cukup berat. Tetapi upaya mengatasi persoalan masih menimbulkan pro dan kontra yang berkembang menjadi polemik. Untuk menutup Bolong keuangan negara, kebijakan ekonomi Megawati Soekarnoputri diimplementasikan dengan melego saham BUMN, mengurus simpanan pemerintah, dan menjual aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).⁷

Wajar bila Megawati Soekarnoputri membuat semacam komitmen pengembangan investasi di tanah air guna mendorong pertumbuhan ekonomi, sebab pada saat Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, laju investasi ke Indonesia terus Merosot. Pada tahun 2002 persetujuan PMA (Penanaman

³Sidarta Gautama, *Harapan dan Tantangan Di Kursi Wapres RI*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). Hlm 45

⁴Suroso P. G, *perekonomian Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm 1

⁵Gunadarma, *Sejarah Ekonomi Indonesia(orde lama-Era Reformasi)*, (Jakarta:Wartawarga, 2011).

⁶Sidarta Gautama, *Megawati SoekarnoputriDitengah Rivalitas Sengit Calon-CalonPresiden*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 74-75

⁷Sidarta Gautama, *Megawati SoekarnoputriDitengah Rivalitas Sengit Calon-Calon Presiden*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 76

Modal Asing) mengalami penurunan sampai sebesar US \$ 9,7 milyar dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) bergeser ke bawah hingga terkoreksi sebesar Rp 53 triliun. Dengan kecenderungan penurunan investasi dimasa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, wajar jika penerapan tenaga kerja pada periode Megawati Soekarnoputri menjadi presiden merupakan yang terberat karena tingkat pengangguran yang mencapai 11 persen dari angkatan kerja (Data Propenas Bappenas).⁸

Taufik kiyas suami Megawati Soekarnoputri tokoh PDI Perjuangan mengemukakan banyak hal yang disebutnya sebagai prestasi Megawati Soekarnoputri. Taufik mengatakan Megawati Soekarnoputri mampu membawa bangsa keluar dari krisis selama kepemimpinannya dikursi presiden, dengan nada yakin Taufik mengatakan di masa Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, banyak kemajuan yang patut dicatat, perolehan pajak negara dari Rp 50 triliyun menjadi Rp 260 triliyun, kurs rupiah relatif stabil terhadap dolar AS pada kisaran Rp 8.500, perjalanan ke luar negeri dengan persetujuan DPR dan sebagainya.⁹

Untuk membayar hutang Indonesia Megawati Soekarnoputri menempuh kebijakan penjualan beberapa Aset Negara kepada pihak asing, salah satunya menjual Indosat dan Telkomsel, menjual gas alam ke China, termasuk kapal tengker pertamina, Bank BCA, Bank International Indonesia dan beberapa aset penting lainnya. Penjualan kapal tengker tersebut adalah karena posisi keuangan APBN mengharuskan untuk menarik dana pertamina, khususnya dari bagian yang belum disetor selama 2 tahun sebesar Rp 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp. 18 triliun. Uang itu untuk menutup defisit anggaran.¹⁰

2. Bidang Hukum

Kebijakan Bidang Hukum presiden Megawati Soekarnoputri adalah melakukan pemberantasan korupsi dengan merealisasikan berdirinya komisi pemberantas korupsi (KPK). Sekalipun telah didirikan KPK karena tidak ada gebrakan konkrit yang menonjol. Peringkat RI sebagai negara terkorup tetap memburuk. Pada tahun 2002, dari 102 negara indonesia menduduki peringkat ke-4 pada tahun 2003 indonesia menempati peringkat ke-6 dari 133 negara pengangkatan jaksa Agung M.A Rachman tidak memberikan arti penegakan hukum yang sangat signifikan tanpa ada retorika tegas tentang penegakan korupsi.¹¹

Selama masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri di Indonesia terjadi beberapa peristiwa terorisme yang telah membuat kekhawatiran pada masyarakat Indonesia dan juga masyarakat internasional salah satunya peristiwa Bom Bali. Untuk menangani permasalahan terorisme, suatu negara akan membentuk sebuah koalisi bersama melalui kerja sama dari masing-masing intelijen untuk dapat mengungkap dan menangkap pelaku teror. Menurut paulpillar yang membentuk CIA kontra-terorisme Amerika serikat, intelijen merupakan hal yang paling substansial sebagai instrumen dalam melakukan kerja sama counter-terorism dengan negara lain.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memerangi terorisme baik sebelum terjadinya peristiwa Bom Bali atau tepatnya pasca tragedi 911 maupun pasca Bom Bali. Yang terjadi selama Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri terutama sejak february 2002. Rentetan peristiwa pemboman tersebut semakin memperkuat keyakinan pemerintahan Australia bahwa isu terorisme global harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pertahanan dan keamanannya dimasa depan, hal tersebut dikarenakan beberapa peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu tersebut tampaknya memang sengaja ditujukan kepada Australia sebagai salah satu negara sekutu Amerika Serikat, oleh karena itu dalam penanganan kasus Bom Bali yang melibatkan Australia, maka

⁸Sidarta Gautama, *Megawati Soekarnoputri Di Tengah Rivalitas Calon-Calon Sengit*, (Jakarta : RinekaCipta, 2004), hlm 77

⁹*Ibid*, hlm 42

¹⁰Abu Fasa, *Penjualan Tengker Pertamina*, (Jakarta:Redaksi Harian Pelita, 2003),

¹¹*Ibid*, hlm 3

antara Indonesia Australia melakukan kerja sama baik itu secara bilateral, regional maupun multilateral untuk mengungkap fakta tentang kasus pembomandiberbagai wilayah Indonesia.¹²

Lain halnya dengan konflik Ambon, Poso yang semula melibatkan dua kelompok agama, kejadian di Poso dan di Ambon adalah konflik yang sempat menjadi teori pembuka pemerintahan Megawati Soekarno putri. Megawati Soekarno putri secara khusus menugaskan Wapres Hamzah Haz untuk menangani konflik Ambon, Poso. Pemerintah dalam menyelesaikan konflik Poso, Ambon Pemerintah dan parlemen menggelar BluePrint untuk menyelesaikan kasus ini. Program rekonsiliasi rekonstruksi yang sudah dilakukan dengan berbagai pihak (termasuk lembaga internasional dan lembaga penelitian dalam negeri) perlu difasilitasi, dengan anggaran dan sumber daya manusia yang netral.¹³

C. Capaian Selama Pemerintahan Megawati Soekarno putri 2001-2004

1. Politik dan Hukum

Megawati Soekarno putri dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan menjadi sejuk dan kondusif. Walaupun ekonomi Indonesia mengalami perbaikan, seperti nilai tukar rupiah yang agak stabil, tetapi Indonesia pada masa pemerintahannya tetap saja tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lainnya.¹⁴

Belajar dari pemerintahan presiden yang sebelumnya, Megawati Soekarnoputri lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Megawati Soekarnoputri juga lebih memprioritaskan diri untuk mengunjungi wilayah-wilayah konflik di Tanah Air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan atau Timor Barat. Dengan kata lain, anggaran presiden ke luar negeri dapat dihemat dan dialokasikan untuk membantu penderitaan rakyat di daerah-daerah itu, tanpa harus mengabaikan pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi sebagai salah satu aspek penting penyelenggaraan pemerintah yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri. Dan yang lebih penting, untuk membuktikan kepada rakyat bahwa pemerintahan Megawati Soekarnoputri memiliki *sense of urgency* dan *sense of crisis* yang belum berhasil dibangun pemerintahan sebelumnya.¹⁵

Dapat dipahami jika berbeda dengan pemerintahan Abdurrahman Wahid, gaya dan pola diplomasi era Megawati Soekarnoputri sifatnya sangat konservatif di tengah kekuatan domestik yang sudah rapuh dan konstelasi politik global yang telah berubah. Akibatnya, Sipadan dan Ligitan lepas dari rengkuan Indonesia. Megawati Soekarnoputri mengikuti gaya pendahulunya, Abdurrahman Wahid baik dalam sikap keras kepala maupun secara intensif melakukan kunjungan ke luar negeri.

Komponen pokok yang ada di dalam pembangunan politik adalah pemerintah harus selalu mampu menanggapi setiap perubahan yang ada dalam masyarakat, sebab suprastruktur dan infrastruktur politik yang ada memang berfungsi secara optimal, yang kesemuanya didukung oleh warga negara yang dinamis dan berada dalam naungan persamaan hukum dan perundang-undangan. Pencapaian hal-hal tersebut biasanya selalu menimbulkan permasalahan yang menyangkut identitas (jati diri) bangsa legitimasi, kekuasaan, partisipasi anggota masyarakat, serta menyangkut pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui sistem yang efektif yang menjangkau keseluruhan masyarakat.

Indonesia telah mencapai suatu era dimana kebebasan berserikat, mengeluarkan pendapat dan berekspresi telah didapat. Setiap orang bebas berpolitik, bebas mengeluarkan aspirasinya. Untuk

¹²Kompas 2011, *Hubungan RI-Australia Kepentingan dua pihak*. Diakses dari http://www.kompas.com/kompas_cetak0111/29/in/hubu03.htm

¹³Jihad Ahlas, *Konflik Poso Adalah Konflik Agama*, (Jakarta: Buletin Laskar, 2003), hlm 12

¹⁴Wuryandari, *Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2008).

¹⁵Wuryandari, *Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2008)

membangun Indonesia lebih baik pemerintahan Megawati Soekarnoputri diperlukan perbaikan dari berbagai pihak, dari pemerintah juga rakyatnya. Masing-masing harus memiliki kesadaran untuk berubah untuk itu sangat perlu partisipasi dan kerja keras kedua belah pihak yaitu pemerintah dan rakyat agar tercapai kesejahteraan, kemakmuran dan kemajuan bagi bangsa Indonesia demi membangun Indonesia ke arah yang lebih baik.¹⁶

2. Ekonomi

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001 berkisar antara 3-4 persen dan bertumpu pada pengeluaran pembentukan modal tetap domestik bruto (*gross domestic fixed capital formation*) dengan catatan perbankan mulai dapat menyalurkan kredit dalam jumlah yang memadai. Sumber pertumbuhan lain adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yang akan naik akibat mulai membaiknya tingkat pencatatan real pada tahun 2000. Apalagi ditambah dengan kepercayaan konsumen yang diharapkan terus membaik dengan telah terbentunya pemerintahan baru ditambah pula dengan stabilitas politik dan keamanan yang cukup terjaga. Sementara itu, ekspor sangat sulit diharapkan dapat meningkat sebaik tahun 2000 karena pertumbuhan ekonomi tahun 2001 menunjukkan kecenderungan menurun.

Pada Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri, nilai tukar rupiah kita berada pada posisi stabil dikisaran Rp. 8000 per 1 dollar. Hal ini berhasil dipertahankan hingga akhir masa jabatannya. Pencapaian yang dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, termasuk istimewa, karena sebelumnya, nilai tukar rupiah berada pada posisi antara Rp. 9000 hingga Rp. 14 ribu rupiah.

Menurut *World Economic Outlook* September 2003 kinerja perekonomian dunia diperkirakan akan mengalami pemulihan cukup. Sementara itu, kebijakan ekonomi makro Indonesia pada tahun 2004 akan diarahkan kepada tiga sasaran utama yakni, memelihara stabilitas ekonomi makro, memantapkan sektor keuangan, dan memelihara iklim usaha dan iklim investasi, termasuk penciptaan lapangan kerja.

3. Pemberantasan Korupsi

Komisi pemberantasan korupsi Republik Indonesia (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 mengenai komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

KPK dibentuk oleh pemerintah, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, dan BPK.¹⁷

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 menyangkut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jadi perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia teramat memprihatinkan dan berlangsung dengan cara meluas di kehidupan warga. Perkembangannya tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat dan jumlah kerugian negarapun sangatlah besar dan ini berpengaruh bagi kehidupan perekonomian nasional pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹⁶Alfian, *Masalah Politik Indonesia*, (Jakarta:PT.Gramedia,1990).

¹⁷Ackerman, Rose, Susan, *Korupsi Pemerintahan Sebab Akibat dan Reformasi*,(Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2006).

Setelah menjabat sebagai presiden Megawati Soekarnoputri menghadapi berbagai persoalan Negara, terutama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan Bebas dari KKN sebagaimana amanat Tap MPR No. XI/1998. ketika megawatiSoekarnoputri mengumumkan susunan Kabinet Gotong Royong di Istana Negara Jakarta pada hari kamis, 9 Agustus 2001 pukul 11.00 WIB presiden Megawati Soekarnoputrimenyinggung program kerjanya yang dikaitkan dengan usaha mewujudkan supremasi Hukum dan tekad menindak para pelaku KKN.¹⁸

Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang- undangan untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Diantaranya ada KUHP, Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta revisinya melalui Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002. Secara substansi Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat menjerat berbagai modus tindak pidana korupsi.

Tekad presiden Megawati Soekarnoputri suka tidak suka akhirnya akan berhadapan dengan realitas betapa parahnya korupsi dinegara yang harus Megawati Soekarnoputri pimpin. angka-angka yang menyebutkan setiap tahun negara dirugikan Rp.288 triliun, belum termasuk penyelundupan pasir laut Rp. 72 triliun, kekayaan laut Rp. 36 triliun yang dikuras, dan bahan bakar minyak Rp. 50 triliun menunjukkan betapa besar kerugian yang diderita negara.

Pemberantasan KKN ini MPR menentukan arah kebijakan di bidang hukum yang harus ditempuh presiden Megawati Soekarnoputri (GBHN 1999:64) yakni :

- a. mengembangkan budaya hukum demi tegaknya negara hukum
- b. membangun integritas moral dan keprofesionalan aparat hukum
- c. mewujudkan lembaga peradilan hukum yang mandiri
- d. menyelenggarakan peradilan cepat, mudah, murah bebas KKN.

Keteladanan harus dimulai dari penyelenggara negara itu sendiri, MPR memberi arah kebijakan untuk :

- a. membersihkan penyelenggaraan negara dari praktik KKN dengan memberikan sanksi seberat-beratnya disertai pengawasan,
- b. meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur negara
- c. memeriksa kekayaan pejabat negara dan pemerintah
- d. meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
- e. meningkatkan kesejahteraan aparatur negara.

4. Pemberantasan Terorisme

Masalah terorisme di Indonesia bukanlah persoalan jangka pendek, melainkan persoalan jangka panjang. sejak peristiwa Bom Bali dan menyusul penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh Polri terhadap pihak-pihak yang dicurigai terlibat Bom Bali, kelompok-kelompok teroris secara bersama sepakat untuk menggosongkan pulau Jawa dan memindahkan para anggotanya keluar pulau Jawa. sementara yang ditinggalkan hanya segelintir anggota tingkat operasional rendah saja.

beberapa waktu yang lau media cetak memberitakan bahwa sejumlah LSM telah melaporkan pihak polri melakukan penangkapan terhadap 15 orang tersangka pelaku Bom serta menculik 25 orang aktivis islam yang sejak beberapa waktu telah menghilang. padahal sebenarnya 25 orang yang diberitakan hilang tersebut merupakan bagian dari anggota kelompok teroris yang melakukan eksodus dari pulau Jawa.

Disatu daerah dapat saja didiami oleh satu kelompok teroris. tetapi dapat juga didiami oleh beberapa kelompok teroris seperti dipalu, poso terdapat kelompok lamongan dan kelompok banten.

¹⁸Ackerman, Rose, Susan, *Korupsi Pemerintahan Sebab Akibat dan Reformasi*,(Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2006).

adapun taktik yang sering dilakukan oleh para teroris adalah pengeboman, pembajakan, pembunuhan, penyanderaan, dan penculikan.¹⁹

Kejadian peristiwa peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002 di Bali sangat membuat pemerintah kesulitan untuk menjelaskan kepada dunia apa yang sebenarnya telah terjadi karena pada peristiwa Bom Bali banyak dari warga negara asing yang menjadi korban. Untuk mengatasi peristiwa tersebut agar tidak terulang kembali capaian pemerintah Megawati Soekarnoputri menempuh cara untuk mengatasi permasalahan teroris dengan membentuk aturan-aturan yang berkaitan dengan terorisme. yakni dengan diterbitkannya peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan PerpuNo. 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan perpuNo. 1 Tahun 2002 pada peristiwa Bom Bali tanggal 12 Oktober, maka pemerintah bekerja sama dengan DPR RI mengesahkan kedua perpu tersebut menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2003.²⁰

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaid Zainal. 2003. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Percetakan Negara.
- Abidin, Zainal. 2012. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Ackerman, Rose & Susan. 2006. *Korupsi Pemerintahan Sebab Akibat Dan Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ahlah, Jihad. 2003. *Konflik Poso Adalah Konflik Agama*. Jakarta: Buletin Laskar.
- Ahmadin. 2013. *Metode Penelitian Sosial*. Makassar: Rayhan Intermedia.
- Alfian. 1990. *Masalah Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Alrasid, Harun. 1999. *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Djelantik & Sukawarsini. 2008. *Diplomasi Antara Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gautama, Sidarta. 2004. *Megawati Soekarnoputri Di Tengah Rivalitas Sengit Calon-Calon Presiden 2004*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fasa, Abu. 2003. *Penjualan Tengker Pertamina*. Jakarta: Redaksi Harian Pelita.
- Gautama, Sidarta. 2000. *Megawati Soekarnoputri Harapan Dan Tantangan Di Kursi Wapres RI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunadama. 2011. *Sejarah Ekonomi Indonesia (orde lama era reformasi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hardiman, Budi. 2005. *Terorisme, Defenisi, Aksi Dan regulasi*. Jakarta: Imparsial.
- Hermenda, Rizki. 2001. *Perekonomian Pada Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri*. Jakarta: Blogspot.
- Http. 2001. *System Pemerintahan Megawati Soekarnoputri 2001-2004*. Htm
- Kasim, Yandry. 2008. *Sistem Pertahanan Dan Keamanan Nasional Indonesia*. Jakarta: Pacivis UI.
- Kompas. 2011, *Hubungan RI Australia Kepentingan dua pihak*. Diakses dari http://www.kompas.com/kompas_cetak0111/29/in/hubu03.htm
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Suroso P. G. 1994. *Perekonomian Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka.
- Wahid, Abdul. 2004. *Kejahatan terorisme, Perspektif Agama Dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Wuryandari. 2008. *Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Yara Mucyhar. 2003. *Melacak Jejak Terorisme Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

¹⁹Mucyhar Yara, *Melacak Jejak Terorisme Di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2003), Hlm 3

²⁰Zaid Zainal Abidin, *kebijakan publik*, (Jakarta: percetakan Negara, 2003), hlm 22